

## EFEKTIVITAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DALAM MENINGKATKAN KINERJA ASN DI DINAS DUKCAPIL PADANG PARIAMAN

Syafirman<sup>1(a)</sup>, Syamsir<sup>2(b)</sup>

<sup>1,2</sup>Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

<sup>a)</sup>[Syafirman665@gmail.com](mailto:Syafirman665@gmail.com), <sup>b)</sup>[syamsirsaili@yahoo.com](mailto:syamsirsaili@yahoo.com)

### INFORMASI ARTIKEL

#### Article History:

Dikirim:

09-08-2024

Diterbitkan Online:

01-09-2024

#### Kata Kunci:

Efektivitas, Akuntabilitas, Kinerja

#### Keywords:

Effectiveness, Accountability, Performance

#### Corresponding Author:

[Syafirman665@gmail.com](mailto:Syafirman665@gmail.com)

#### DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v3i3.223>

### PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan pembangunan untuk membangun tata kelola yang baik (good Corporate Governance) dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pemerintahan yang merupakan tujuan utama seluruh instansi pemerintah di Indonesia.. Sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Padang Pariaman. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang didukung oleh hasil wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang diterapkan pada ASN di Dinas Dukcapil Padang Pariaman, dan dianalisis menggunakan tujuh indikator yang dikemukakan oleh Siagian, dapat disimpulkan bahwa kinerja ASN di Dinas Dukcapil Padang Pariaman sudah baik. Hal ini tercermin dari efektivitas program-program yang berasal dari pusat dan berskala nasional, pencapaian efektivitas kinerja, serta ketepatan dalam membawa proses analisis dan perumusan kebijakan yang bersifat mendidik dan membawa perubahan positif. Selain itu, tujuan dan target yang jelas telah dimiliki. Namun demikian, peningkatan konsistensi kinerja dan evaluasi yang lebih baik masih diperlukan.

### ABSTRACT

*This study aims to describe the effectiveness of the Government Agency Performance Accountability System (SAKIP) in improving the State Civil Apparatus (ASN) performance at the Population and Civil Registration Office of Padang Pariaman. This study uses a qualitative method with a descriptive approach, which is supported by the results of interviews. Based on the results of research applied to ASN at the Padang Pariaman Population and Civil Registration Office and analyzed using seven indicators put forward by Siagian, it can be concluded that the performance of ASN at the Padang Pariaman Population and Civil Registration Office is good. This is reflected in the effectiveness of programs originating from the center and on a national scale, the achievement of performance effectiveness, and accuracy in analyzing and formulating educational policies that bring positive changes. In addition, clear goals and targets are in place. However, improved performance consistency and better evaluation are still needed.*

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Untuk menjaga pelayanan publik sebagai jati diri dan jati diri Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu bangsa sebagaimana diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sebagai bahan tanggung jawab sosial, kehidupan, kehidupan berbangsa, dan kehidupan berbangsa, oleh karena itu: harus

dikelola dan dilestarikan oleh negara. Hal ini tertuang secara tertulis dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang secara khusus mengatur tentang Rencana Akuntabilitas Kinerja Badan (SAKIP).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP) merupakan sistem perencanaan, penganggaran, dan sistem yang terpadu. Untuk mencapai akuntabilitas kinerja pemerintah yang berorientasi pada hasil, pertama-tama pemerintah harus menetapkan hasil yang jelas berupa kondisi yang ingin dicapai dan menetapkan indikator kinerja yang terukur dan relevan untuk mencapai keberhasilan.

**Tabel 1. Kategori Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

No	Kategori	Nilai	Angka Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan
3	BB	>70-80	Sangat Baik
4	B	>60-70	Baik
5	CC	>50-60	Cukup Baik
6	C	>30-50	Kurang
7	D	>0-30	Sangat Kurang

Sumber: Data Sekunder Inspektorat Padang Pariaman (2024)

Untuk mencapai hasil yang maksimal diperlukan keterlibatan seluruh sektor pemerintah daerah. Komitmen yang kuat dari pimpinan lembaga untuk membangun tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih di dunia kerja merupakan faktor kunci dalam mencapai SAKIP.

Aparatur Sipil Negara yang disebut ASN merupakan ujung tombak pemerintahan kepada masyarakat dan tujuannya menyelenggarakan fungsi pemerintahan baik pusat maupun daerah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menargetkan untuk memindahkan penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ke kategori BB pada periode berikutnya.

**Tabel 2. Daftar Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman**

No	Tahun	Nilai	Kategori	Nilai
1	2019	67,01	B	Baik
2	2020	67,21	B	Baik

No	Tahun	Nilai	Kategori	Nilai
3	2021	65,80	B	Baik
4	2022	68,86	B	Baik
5	2023	69,19	B	Baik

Sumber: Data Sekunder Inspektorat Padang Pariaman (2024)

Setelah kajian ini dilakukan, dilakukan kajian terhadap pedoman teknis dan peraturan terkait untuk mengkaji dan lebih memahami penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP) bagi seluruh pegawai instansi (ASN). Tanggung jawab atas kinerja lembaga.

Dalam penelitian ini penulis mengukur efektivitas sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan. Beni (2016: 69) menyatakan Efektivitas adalah hubungan antara kinerja dan tujuan dan juga dapat dianggap sebagai ukuran tingkat kinerja, kebijakan, dan prosedur suatu organisasi. Akuntabilitas adalah kewajiban seseorang, badan hukum, dan/atau pimpinan organisasi untuk menjawab dan menjelaskan kinerja orang, badan hukum, dan/atau pimpinan organisasi kepada pihak mana pun yang berhak atau berwenang menerima dan meminta, informasi atau akuntabilitas. (Adisssmita: 2014). Kinerja merupakan hasil evaluasi pekerjaan yang dilakukan berdasarkan kriteria yang ditentukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam meningkatkan kinerja ASN di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Padang Pariaman.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Padang Pariaman. Jika dikaji pemahaman ASN terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi, ASN adalah kepala bagian pelayanan, kepala bagian umum dan kepegawaian, kepala bagian keuangan, koordinator, dan kepala bagian bagian keuangan, Sub perencanaan, otoritas pengawas dan tenaga ahli SAKIP. Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data, salah satunya adalah wawancara dengan melakukan tanya jawab survei kata, dan yang lainnya adalah dokumentasi melalui catatan dan file yang berkaitan dengan penelitian. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif dan kualitatif dengan pengumpulan

data, reduksi data, penyajian dan validasi data, serta penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Penduduk Kabupaten Padang Pariaman merupakan instansi pemerintah yang bertugas menerbitkan dokumen pencatatan sipil dan kependudukan untuk wilayah Padang Pariaman. Dengan rumusan masalah dan fokus penelitian, penelitian ini mengkaji efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam meningkatkan kinerja ASN. Hasil penelitian adalah:

### **Kejelasan tujuan**

Kejelasan tujuan merupakan hasil utama dari pencapaian setiap tujuan secara metode. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan dan waktu pencapaian tahapannya harus dilakukan secara bertahap.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Catatan Sipil Padang Pariaman, proyek tersebut jelas karena masuk dalam RENSTRA Kantor Catatan Sipil Padang Pariaman 2026-2021. Dan itu telah menegaskan pencapaian tujuan yang telah dicapai. Pemerintahan yang baik dan jujur telah tercipta.

### **Kejelasan Strategi**

Dalam mencapai tujuan merupakan penentuan Langkah-langkah yang akan dilakukan yang agar akan memungkinkan memperoleh hasil yang optimal, efektif dan efisien dalam jangka waktu yang singkat serta tepat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hasibuan, (dalam Natika 2022).

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan Dinas Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman memiliki strategi tersendiri dalam meningkatkan nilai SAKIP. Kejelasan strategi dalam mencapai tujuan sudah terlampirkan dalam RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman 2021-2026. Dengan adanya kejelasan strategi yang telah di rumuskan dinas Dukcapil berhasil meningkatkan Penilaian SAKIP.

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan dan penelitian yang telah dilakukan maka disimpulkan Kejelasan strategi dalam mencapai tujuan Dinas Dukcapil telah sesuai dengan teori yang dipaparkan sehingga dinas Dukcapil dapat mencaapi tujuan yang telah ditetapkan dengan tepat dan sesuai dengan sasaran. Yaitu dalam mengoptimalkan proses dalam mencapai tujuan

dan juga keefisienan dinas dukcapil Padang Pariaman dan juga efektivitas dalam kejelasan strategi seperti yang telah ditetapkan.

### **Proses Analisis dan Perumusan Kebijakan**

Perumusan kebijakan merupakan perilaku dari sebuah organisasi dalam memberikan bimbingan dan berfikir dalam menentukan Tindakan apa yang akan diambil.

Perumusan kebijakan dinas dukcapil Padang sudah terbilang kebijakan yang mantap tetapi belum sepenuhnya karena ada beberapa faktor yang menjadi terhambatnya proses analisis dan perumusan kebijakan antara lain seperti kendala ketidaksesuaian data kinerja, kurangnya koordinasi dalam proses kebijakan dalam suatu instansi dan yang masalah basic seperti kurangnya pemahaman mengenai pentingnya SAKIP yang menjadi faktor utama dalam terhambatnya tujuan tujuan dalam suatu kebijakan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dinas Dukcapil Padang Pariaman sudah melakukan semua proses analisis dan perumusan kebijakan sesuai dengan teori yang dikaitkan, dimana teori mengatakan bahwa dalam perumusan kebijakan harus terdapat unsur pedoman dan pengambilan Keputusan, dinas Dukcapil dalam pengambilan Keputusan berpedoman pada tujuan yang telah ditentukan sehingga setiap kebijakan yang akan dibuat dinas Dukcapil sudah hampir mantap.

### **Perencanaan**

Perencanaan yang matang adalah sebuah Keputusan yang tepat tentang segala sesuatu yang akan dilakukan dalam jangka waktu tertentu baik dimasa yang akan datang maupun dimasa sekarang dengan harapan tujuan yang telah ditetapkan tercapai sesuai dengan apa yang ditargetkan.

Perencanaan dalam dukcapil Padang Pariaman hampir perencanaan matang alasanya karena semua program program sudah berasal dari pusat dan fokus targetnya sudah skala nasional tetapi masih memerlukan pengikatan dalam konsistensi dan juga harus diperlukannya evaluasi untuk kesesuaian dengan harapan dalam menuju perencanaan yang matang.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dinas Dukcapil Padang Pariaman sudah mempunyai perencanaan yang matang karena dinas dalam setiap pengambilan Keputusan yang diambil dinas Dukcapil melihat segala

yang yang akan terjadi dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang.

### **Penyusunan Program**

Penyusunan program yang baik adalah rencana yang disusun dan pada hakekatnya menggambarkan rencana yang benar-benar akan dilaksanakan.

Menurut Malayu SP, Hasibuan dalam bukunya Manajemen, Pengertian Tujuan dan Masalah mengartikan program sebagai rencana yang benar-benar menggambarkan suatu rencana konkrit yang terdiri dari tujuan, prosedur, dan anggaran. Hasibuan, (dalam Natika, 2020) Persiapan program Dukcapil Padang Pariaman sudah berada pada jalur yang tepat dalam membantu pegawai mencapai tujuan organisasi dengan lebih mudah, namun upayanya masih perlu perbaikan. Cara persiapannya perlu diperhatikan. Kami memberikan program yang selaras dengan visi dan misi Anda serta selaras dengan kebutuhan Anda saat ini. Selain itu, penyesuaian program harus dipertimbangkan ketika meningkatkan kapasitas staf dan teknologi informasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, seluruh program yang dilaksanakan oleh Dinas Dukcapil sudah berada pada jalur yang benar, namun tidak semua yang direncanakan dapat sesuai dengan keadaan nyata di lapangan. Sebaiknya Anda berhati-hati dalam menentukan tujuan dari Dinas Dukcapil itu sendiri agar Anda dapat dengan mudah mencapai tujuan tersebut.

### **Pelaksanaan**

Pelaksanaan yang efektif dan efisien merupakan Langkah yang sangat krusial untuk dilakukan, karena pada tahap ini yang menentukan apakah suatu tujuan tercapai atau tidak.

Pelaksanaan kinerja kerja dukcapil Padang Pariaman sudah mencapai efisiensi dan efektivitas karena sudah sesuai dengan hasil yang didapatkan dalam proses pelaksanaan program program kerja tetapi hal ini menjadi tantangan bagi dukcapil Padang Pariaman dalam tahap selanjutnya namun dengan adanya evaluasi dapat mengatasi permasalahan untuk perbaikan selanjutnya, dukcapil Padang Pariaman selalu mendapatkan hasil yang terbaik.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dinas Dukcapil Padang Pariaman sudah melaksanakan semua program dengan efektif

dan Efisiensi yang mana dapat dilihat dari hasil yang telah dinas Dukcapil Padang Pariaman yang menandakan tujuannya tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

### **Sistem Pengawasan**

Pengawasan adalah salah satu faktor yang mengarah kepada tujuan, sehingga bersifat harapan yang menunjukkan apa yang harus dilakukan. Keterkaitan antara pengawasan dan pengendalian dalam ukuran efektivitas merupakan satu kesatuan yang memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan.

Sistem pengawasan dan pngendalian Dukcapil Padang Pariaman sudah bersifat mendidik karena semua program sudah bergerak sesuai kearah mendidik karena dapat membawa ke arah yang baik, hal yang dapat di ciptakan untuk menjalankan hal ini dengan feedback konstruktif dapat mendorong dan mengembangkan kapasitas kerja, dan memberi pengarahan tentang hal hal positif menjadi sebuah budaya, adapun salah satu program ini adalah apel pagi.

Berdasarkan Pemaparan teori diatas Pengawasan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi dalam pencapaian suatu tujuan, dinas Dukcapil Padang Pariaman sudah melakukan pengawasan yang bersifat mendidik yang dapat membawa ke arah yang lebih baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### **PENUTUP**

Berdasarkan temuan penelitian mengenai efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (Sakip) dalam meningkatkan kinerja ASN di Dinas Dukkapol Padang Pariaman, penulis menarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang sudah jelas pada Dukkapol Padang Pariaman. Pada 7 indikator teori yang berkaitan dalam kejelasan tujuan dan strategi menunjukan bahwa sudah tercantum dalam RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman 2021-2026. Pelayanan Dukcapil dinilai matang karena programnya bermula dari pusat dan terfokus pada tujuan nasional. Namun peningkatan kinerja dan konsistensi penyusunan program yang baik masih perlu ditingkatkan. Implementasi yang efektif dan efisien: Pelayanan Dukcapil Padang Pariaman telah mencapai efisiensi dan efektivitas. Hal ini terlihat dari hasil pelayanan Dukapil Padang Pariaman. Ini mendidik dan dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik.

Dalam pelaksanaannya, faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi selalu diupayakan untuk Kinerja SAKIP pada ASN di Dinas Dukcapil Padang Pariaman. terus mempertahankan hasil kinerja yang telah dicapainya dan meningkatkan hal-hal yang dapat menghalangi atau menghambat dalam proses pencapaian tujuan, dan Pemerintah lebih memperhatikan lagi jumlah tenaga kerja yang ada Dinas Dukcapil Paang Pariaman karena banyak pekerjaan yang banyak dirangkap oleh para pegawai Dinas Dukcapil itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Perbup Padang Pariaman No.58 tahun 2021  
SOTK Inspektorat Daerah
- Angraini, M. D. (2023). Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam Menunjang Good Governance Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DI KECAMATAN KABUH (Doctoral Dissertation, STIE PGRI Dewantara Jombang) Indonesia Kota Jambi) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS JAMBI).
- Ariatin, D. (2021). Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terhadap Penerapan Good Governance Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- ARZA, W. (2023). Partisipasi Politik Komunitas Tuna Rungu Kota Jambi Dalam Pemilihan Gubernur Jambi Tahun 2020 (Studi Kasus Dewan Perwakilan Cabang Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Beni Pakei, Konsep dan Analisis (Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah). Jayapura: Tausia
- Buku Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 <https://djka.dephub.go.id/buku-pedoman-sistem-akuntabilitas-dan-kinerja-instansi-pemerintah-tahun-2023> (Diakses Januari 2024)
- Munthe, Y. U., & Lubis, F. A. (2022). Pengaruh dan Efektivitas Media Sosial pada Proses Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Sedekah: Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Al-Washliyah Beramal (LAZ WASHAL)) Sumatera Utara. *JIEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 2(2), 2536-2546.
- Muzayanah, M. (2020). Pemahaman Terhadap Tanggungjawab, Hak Dan Kewajiban Pegawai Terhadap Uu No 5 Tahun Biography
- Steers, M Richard. Efektivitas Organisasi. (Jakarta: Erlangga 1985) hal. 53
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
- Wibowo, F. A. (2022). Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Ponorogo. *JI@ P*, 11(1).
- Yossi Dian Endahwati, "Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)", *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 4, No. 1 (Desember, 2014), 1357-1358